

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Australia mengalami perubahan arah ekonomi sejak terjadi reformasi ekonomi yang dimulai pada kisaran dekade 1970. Reformasi tersebut dimulai pada masa kepemimpinan Gough Whitlam, akan tetapi banyak ahli yang mengatakan bahwa reformasi ekonomi yang sesungguhnya barulah terjadi di masa kepemimpinan Bob Hawke. Hal tersebut dikarenakan pada masa Bob Hawke, pemerintah benar-benar melakukan banyak perubahan.

Bob Hawke terpilih sebagai perdana menteri Australia pada 11 Maret 1983 sebagai suksesor Malcolm Fraser. Masa kepemimpinannya berakhir pada 20 Desember 1991 dan digantikan oleh Paul Keating hingga 11 Maret 1996 yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara negara.

Selama periode tersebut, beberapa perubahan dilakukan seperti pemberlakuan kurs mengambang (*floating exchange rate*), deregulasi sistem keuangan, dan privatisasi. Kemudian pada masa pemerintahan Paul Keating, ia melakukan beberapa peningkatan atas apa yang telah dilakukan oleh Bob Hawke.

Selain itu pada masa pemerintahan Bob Hawke, Australia mulai melakukan upaya kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia. Hal ini dibuktikan dengan peran penting Bob Hawke sebagai inisiator *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC). Keadaan ekonomi negara-negara di wilayah Asia, khususnya Asia Timur pada saat itu sangat dinamis hingga menarik

perhatian banyak negara di dunia. Mengutip Ann Capling, dalam sebuah jurnal ia menuliskan:

To be sure, the dynamism of the East Asian economies has meant that governments worldwide have become much more attentive to the region during this period. But as Higgott and Nossal (1997) observe, during the period of the Labor governments of Bob Hawke and Paul Keating (1983–96), Australia was unique in its deliberate and self-conscious efforts to ‘relocate’ itself—economically, diplomatically and militarily—to the Asia Pacific region. For the Keating government in particular, the Asian engagement ‘project’ was tied to a broader agenda to forge a new national identity for Australia as an independent cosmopolitan society, located in Asia, with an international role that was not primarily reflective of Australia’s origins as a British colony and its alliance relationship with the United States (Capling, 2008).

Biro Statistik Australia dalam laporan tahun 2001 bahkan mengatakan bahwa fokus utama perdagangan Australia adalah negara-negara anggota APEC (Statistics, 2001). Dari 10 negara yang menjalin hubungan dagang terbesar dengan Australia, 6 diantaranya adalah negara-negara di wilayah Asia. Termasuk salah satunya Cina, yang menempati urutan pertama dalam daftar tersebut.

Cina yang merupakan salah satu negara dengan kekuatan politik dan ekonomi terbesar di dunia menjadi alasan mengapa Australia terus mendekatkan diri untuk kepentingan nasional (The Diplomat, 2009). Kerjasama dengan Cina dimulai pada tahun 1972, yaitu pada masa pemerintahan Whitlam. Kedua negara saat ini berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama baik dalam bidang ekonomi maupun dalam hubungan yang lebih luas.

Stabilitas ekonomi Australia berhasil didapat dari upaya reformasi selama tiga dekade. Yaitu yang dimulai pada dekade 1970 pada kepemimpinan Gough Whitlam, dekade 1980 pada masa kepemimpinan Bob

Hawke, dan pada dekade 1990 yaitu di masa kepemimpinan John Howard. Sejak tahun 1991, ekonomi riil Australia tumbuh rata-rata 3,3% per tahun dan *Gross Domestic Product (GDP)* Australia pada tahun 2007 mencapai \$1 triliun (Kedutaan Besar Australia Indonesia, 2017). Surplus anggaran yang terjadi berturut-turut seperti pada tahun 2002 – 2007 membuat Australia berada pada posisi ekonomi yang kuat. Bahkan pada tahun 2005-2006 utang pemerintah dapat terbayar.

Pada akhir tahun 2008 terjadi krisis keuangan global dan memberikan dampak pada perekonomian dunia. Dampak tersebut terjadi karena tiga faktor, yaitu adanya investasi langsung, investasi tidak langsung, dan perdagangan (Departemen Keuangan; DEPKOMINFO; BAPPENAS, 2008). Krisis tersebut dimulai di Amerika pada pertengahan 2007, ditandai dengan jatuhnya pasar saham di bidang properti (*subprime mortgage*). Krisis tersebut terus memburuk dan membuat aset bank serta para pengelola saham global (*hedge funds*) yang melakukan investasi pada *subprime mortgage* menjadi tidak berharga (USA Today, 2013).

Secara umum, krisis keuangan dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dimana permintaan atas uang melebihi persediaan uang itu sendiri. Ini artinya likuiditas dengan cepat menguap karena uang yang tersedia ditarik dari bank, memaksa bank untuk menjual investasi lain agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi atau memaksa bank untuk jatuh dan bangkrut.

Krisis keuangan bukan merupakan hal baru. Bahkan pada pasar yang belum memiliki mekanisme terintegrasi secara internasional seperti saat ini,

krisis keuangan tetap memiliki kemungkinan untuk terjadi. Contoh yang paling awal dapat ditemui adalah pada tahun 1637. Pada tahun tersebut muncul sebuah fenomena pasar bernama *Tulip Mania*. Di Belanda, kemunculan tulip direspon dengan spekulasi yang tinggi oleh pegiat pasar. Sehingga pada saat harga secara tiba-tiba terjatuh, banyak spekulan yang mengalami *over-indebted* atau memiliki hutang terlalu tinggi (Detzer & Herr, 2014).

Sepanjang sejarah, setidaknya terdapat 5 krisis keuangan besar yang pernah terjadi. Kelima krisis tersebut adalah *the credit crisis* yang terjadi pada tahun 1772, *the great depression* di tahun 1929 – 1939, *OPEC oil price shock* 1973, *the Asian crisis* 1997, dan terakhir adalah krisis keuangan 2007-2008 yang dikenal dengan nama *The Global Financial Crisis (GFC)* (Bondarenko, 2017). GFC dikatakan sebagai salah satu krisis terbesar setelah *the great depression* karena dampaknya yang membuat banyak negara butuh waktu lama untuk menjadikan perekonomian kembali stabil.

Krisis finansial akan membawa perekonomian sebuah negara pada krisis ekonomi. Yaitu keadaan dimana GDP turun, likuiditas mengering, dan naik/turunnya harga yang disebabkan inflasi/deflasi. Krisis ekonomi dapat berbentuk depresi maupun resesi. GFC menyebar ke berbagai penjuru dunia dan menyebabkan resesi global. Resesi ditandai dengan tingginya pengangguran, upah yang stagnan, dan jatuhnya penjualan ritel.

Meski krisis keuangan sering terjadi, namun tidak ada satu teori yang dapat menjawab secara umum tentang krisis keuangan. Sifat dan penyebab

masing-masing krisis finansial yang unik membuat para pakar ekonomi memiliki banyak model atau konsep untuk menjelaskan apa itu krisis finansial.

Dalam literatur ekonomi disebutkan bahwa krisis finansial memiliki 3 bentuk; kurs, perbankan, dan hutang luar negeri (Busuiooc-Witowschi, 2010). Oleh karenanya, Kaminsky dan Reinhart mengkategorikan krisis finansial kedalam tiga bentuk yaitu krisis kurs, krisis perbankan, dan *twin crisis* atau krisis yang secara serentak berasal dari perbankan dan kurs (Kaminsky & Reinhart, 1999). Namun meski terdapat tiga tipe krisis keuangan, pada kenyataannya bentuk krisis keuangan tidak murni dari salah satu bentuk yang telah disebutkan. Begitu pula yang terjadi pada GFC. Di Amerika, permasalahan yang terjadi lebih kepada perbankan. Sedangkan di negara lain yang terkena imbas dari GFC memiliki dampak berbeda-beda pada perekonomian mereka.

Di wilayah Eropa, Yunani mengalami imbas GFC dan mengalami krisis karena tingginya hutang luar negeri. Perekonomian Yunani mengalami krisis setelah tingkat kepercayaan pebisnis dan juga rumah tangga mengalami guncangan yang kemudian mempengaruhi keputusan untuk mengurangi transaksi ekonomi. Sebenarnya Yunani berada pada posisi yang lebih baik dari negara-negara OECD dalam menghadapi krisis keuangan global. Akan tetapi, Yunani tidak dapat menghindari resesi sama dengan negara lainnya. Pada Desember 2009, hutang Yunani mencapai angka US\$429 miliar atau setara €300 miliar dan menjadi hutang terbesar Yunani dalam sejarah modern (Lin, Edvinsson, Chen, & Beding, 2013).

Di wilayah Asia, Cina yang menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia juga mengalami hal tersebut. Cina mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan oleh GFC. Mengutip laporan dari *the Centre for International Governance Innovation*:

The impacts of the financial crisis thus far on China's economic performance are reflected in many indicators, including GDP, trade, the trade and current account balances, inflation rates, interest rates, unemployment rates, measures of consumer confidence, housing prices, tax revenues and government expenditures (Whalley, et al., 2009).

Salah satu penurunan yang besar adalah dibidang perdagangan batubara. Angka ekspor batu bara menurun hingga 53.6% dari 4.48 juta ton menjadi 2.08 juta ton (Liyu, 2008).

Berikut penulis paparkan data yang berupa tabel mengenai dampak GFC di berbagai wilayah dunia seperti Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik.

Amerika Serikat

Dampak Krisis	Amerika
Bank / Institusi Keuangan / Korporasi Bangkrut	√
Inflasi meningkat	√
Pertumbuhan Ekonomi berkurang	√
Indeks Bursa Runtuh	√

Tabel 1. 1 Dampak krisis di wilayah Amerika (Departemen Keuangan, 2008)

Wilayah Eropa

Dampak krisi	Islandia	Rusia	Belanda	Inggris	Perancis	Jerman
Bank / Institusi Keuangan / Korporasi Bangkrut	√	√	√	√	√	√
Bank / Institusi Keuangan / Korporasi Merugi	√	√	√	√	√	√
Inflasi meningkat	√	√	√	√	√	√
Pertumbuhan Ekonomi berkurang	√	√	√	√	√	√
Indeks Bursa Runtuh	√	√	√	√	√	√

Tabel 1. 2 Dampak krisis di wilayah Eropa (Departemen Keuangan, 2008)

Wilayah Asia Pasifik

Dampak krisi	Cina	Taiwan	Singapura	Filipina	Jepang	Australia
Bank / Institusi Keuangan / Korporasi Bangkrut			√			
Bank / Institusi Keuangan /	√	√	√	√	√	√

Korporasi Merugi						
Inflasi meningkat	√	√	√	√	√	√
Pertumbuhan Ekonomi berkurang	√	√	√	√	√	√
Indeks Bursa Runtuh	√	√	√	√	√	√

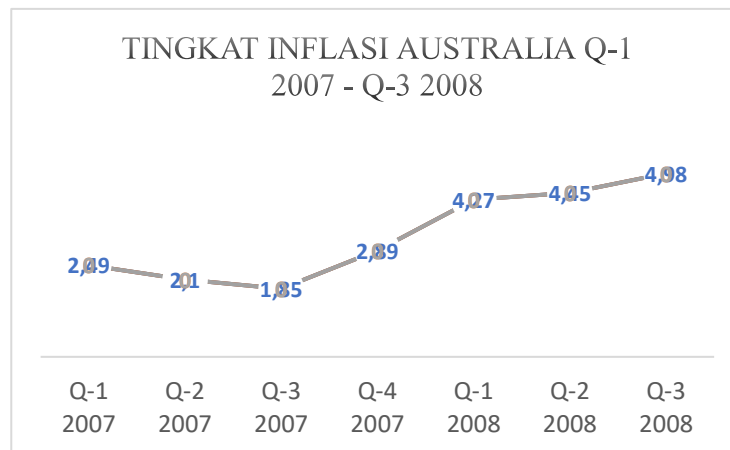
Tabel 1. 3 Dampak krisis di wilayah Asia Pasifik (Departemen Keuangan, 2008)

Australia berada pada status fiskal yang baik pada saat GFC menyebar ke berbagai penjuru dunia. Stabilitas ekonomi tersebut merupakan dampak tidak langsung dari reformasi ekonomi yang dilakukan pada dekade 1970-1990. Selain itu Australia juga tidak memiliki hutang luar negeri. Kondisi-kondisi ini menguntungkan Australia dalam menghadapi GFC. Seperti yang dituliskan oleh David Alexander, seorang *managing director* di Barton Deakin yang juga merupakan mantan penasihat bendahara negara di era Hon Peter Costello pada media *The Guardian* sebagai berikut:

Australia hit the 2008 crisis in rude financial health: debt-free, growing strongly with significant assets and running surplus budgets. It is these robust foundations, along with very favorable terms of trade, which guaranteed that Australia would survive the crisis in very good shape (Alexander, 2013).

Namun ternyata, terdapat beberapa faktor yang menjadikan Australia berada pada posisi rawan terkena dampak GFC seperti negara lain. Profesor keuangan di Universitas Melbourne, Christine Brown dan Kevin Davis dalam tulisannya berjudul *Australia's Experience in the Global Financial Crisis* menuliskan;

The pre-GFC structure of the Australian financial system suggests that Australia had significant potential exposure to the GFC. First, Australia was ranked as the second largest (outside the US) issuer of asset backed securities. Second, the funds management sector (driven by compulsory private pension contribution arrangements) was the fourth largest in the world, with \$1.2 trillion in funds under management. Third, Australia had the largest (albeit still relatively small) hedge fund sector in Asia with no special regulation of hedge funds. Fourth, while the domestic corporate bond and commercial paper markets (excluding securitization) were relatively small, large Australian companies were active issuers in international bond markets. Fifth, the highly concentrated Australian banking sector, where the biggest four banks had a market share of Australian resident assets of 65%, had only around 40-50% of those assets funded by domestic deposits, relying instead heavily on offshore wholesale funding. In addition, house prices had more than doubled in real terms since the mid-1990s with housing affordability at its lowest level since the late 1980s (Brown & Davis, 2010).

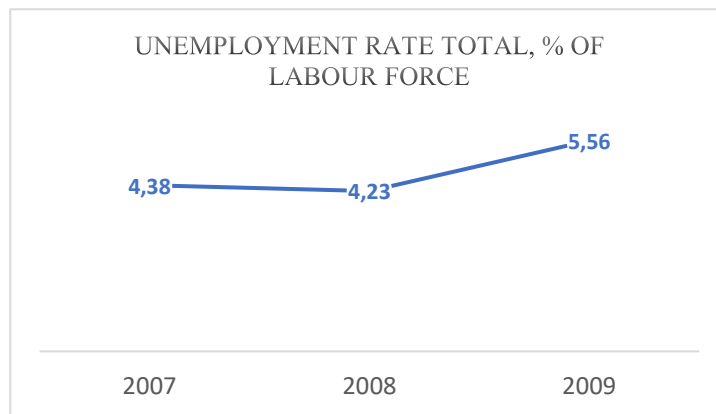


Grafik 1. 1 Grafik Total inflation (CPI), annual growth rate (%) (OECD, 2016)

Dampak dari GFC akhirnya mengenai perekonomian Australia dan kemudian membawa perekonomian Australia pada keadaan krisis. Hal itu ditandai dengan beberapa indikator seperti tumbuhnya inflasi, meningkatnya pengangguran, jatuhnya pasar saham yang membuat institusi keuangan merugi, dan kemudian terakumulasi hingga menyebabkan nilai GDP turun.

Grafik 1.1 merupakan data mengenai tingkat inflasi di Australia selama 7 kuartal yang penulis dapatkan dari data OECD. Pada kuartal 1 hingga kuartal 3 tahun 2007 inflasi Australia mengalami penurunan, akan tetapi

dimulai pada kuartal terakhir tahun 2007 inflasi Australia meningkat. Angka tersebut terus tumbuh hingga akhirnya menyentuh angka 4.98% di kuartal 3 tahun 2008. Secara rata-rata peningkatan inflasi Australia dalam satu tahun, yaitu tahun 2007-2008 sebesar 86.6%.



Grafik 1. 4 Tingkat pengangguran di Australia (OECD, 2016)

Tingkat pengangguran Australia juga mengalami peningkatan. Dari yang sebelumnya berada pada angka 4.38% di tahun 2007, menjadi 5.56% di tahun 2009. Peningkatan pengangguran di Australia dari tahun 2008 hingga 2009 adalah sebanyak 31.4%.

Pada 2007 pasar saham Australia melemah dan pada Januari 2008 turun hingga 17%. Perusahaan investasi *non-bank* pun mengalami adanya guncangan yang menyebabkan turunya harga saham pada kisaran 50 hingga 90 persen dari Agustus 2007 hingga Februari 2008 (Brown & Davis, 2010). GDP Australia turun sebanyak 0.9% pada kuartal tiga di tahun 2008. Bendahara negara Australia, melalui Dr Steven Kennedy dalam sebuah pidato di *Australia Israel Leadership Forum* mengatakan bahwa GFC memberikan permasalahan yang cukup serius bagi Australia (Infrastructure, Competition and Consumer Division, 2009).

Akan tetapi, meski mengalami guncangan seperti yang telah disebutkan di atas, perekonomian Australia dapat kembali menguat. Pada kuartal pertama tahun 2009 ekonomi Australia berhasil tumbuh sebanyak 0.9% dan kembali ke titik awal sebelum terjadi krisis. Pertumbuhan terus terjadi hingga akhir tahun 2009 yang menandakan bahwa Australia tidak terkena resesi seperti negara-negara lainnya.

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis menarik sebuah rumusan masalah yaitu: **Bagaimana strategi Australia dalam menghadapi dampak krisis keuangan global?**

B. Kerangka Pemikiran

1. Ekonomi Keynes

Pada abad ke-18 dan ke-19 terdapat sebuah aliran ekonomi yang dominan, dikenal dengan istilah ekonomi klasik. Istilah tersebut diciptakan oleh Marx untuk merujuk pada pemikiran ekonomi yang lahir dari David Richardo, James Mill, dan pendahulunya (Keynes, 1935). John Maynard Keynes menentang pemikiran tersebut dengan menulis sebuah buku berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Buku tersebut ia tulis sebagai tanggapan atas kegagalan ekonomi klasik mengatasi *The Great Depression*.

The Great Depression merupakan salah satu krisis ekonomi terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah. Krisis yang terjadi selama kurang lebih 10 tahun ini dimulai dengan *Black Thursday* pada 24 Oktober 1929, yaitu pada saat *traders* menjual saham sebesar \$12.9 USD dalam jangka waktu satu hari. Empat hari setelahnya, harga saham jatuh hingga 23% (Amadeo, 2017).

Dalam aliran ekonomi klasik dikatakan bahwa pemerintah tidak diperbolehkan melakukan intervensi apapun pada sistem ekonomi. Hal ini dikarenakan pasar akan selalu menemukan titik ekuilibrium. Segala macam penawaran (*supply*) akan bertemu dengan permintaan (*demand*). Namun, hal tersebut tidak terbukti pada saat *The Great Depression* terjadi di tahun 1929 karena masyarakat cenderung menyimpan uang dan menahan pengeluaran daripada membelanjakan uangnya. Sehingga *supply* yang ada tidak dapat bertemu dengan *demand*, dan titik ekuilibrium tidak terjadi.

Menahan pengeluaran hanya akan memperparah krisis. Dalam bukunya, Keynes menuliskan bahwa segala usaha untuk menabung dengan cara mengurangi pengeluaran akan secara tidak langsung mempengaruhi jumlah pendapatan (Keynes, 1935). Hal ini terjadi dengan mengasumsikan bahwa pendapatan setiap individu mempengaruhi jumlah tabungan mereka, yang sebelumnya telah membentuk titik *equilibrium* pada ekonomi. Dengan menahan pengeluaran, maka titik *equilibrium* yang telah terbentuk sebelumnya akan bergeser. Pergeseran ini akan dimulai dari perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan. Dengan adanya penurunan pendapatan, pengeluaran perusahaan akan juga diturunkan, yang hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti misalnya mengurangi jumlah produksi atau juga

mengurangi jumlah tenaga kerja. Jika hal ini dilakukan, maka pihak selanjutnya yang terkena imbas adalah pegawai yang berada dalam perusahaan tersebut. Siklus ini akan terus berputar dan melumpuhkan ekonomi dari satu titik ke titik lain. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan intervensi terhadap sistem ekonomi agar pasar dapat terus bergerak.

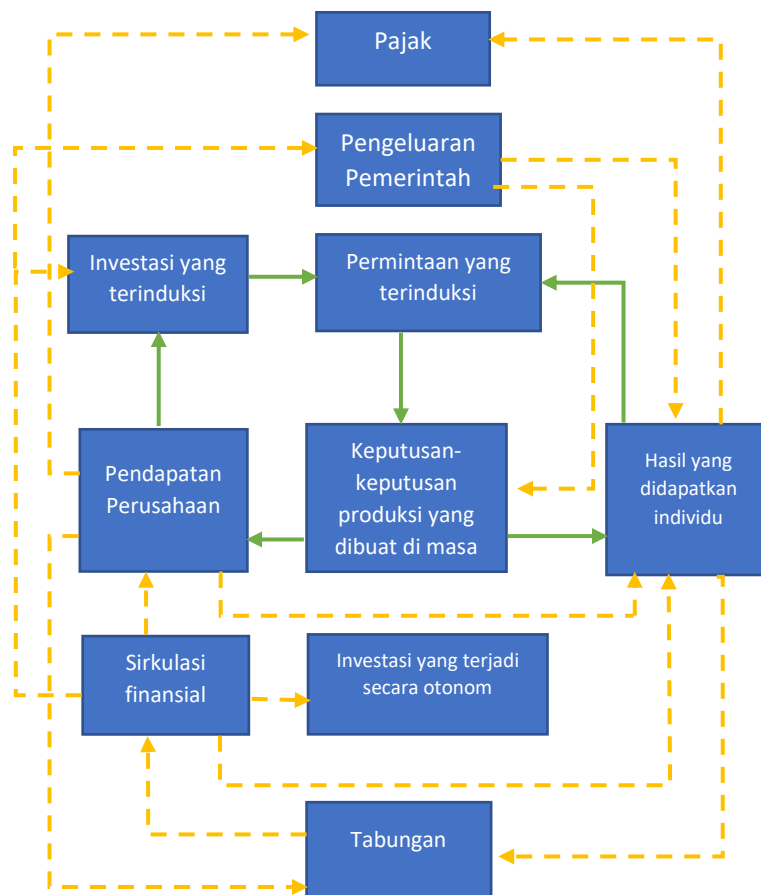
Pemikiran Keynes ini diadaptasi oleh Presiden Roosevelt dengan mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan nama '*New Deal*'. Kebijakan tersebut berhasil menyelamatkan warga Amerika dari *The Great Depression*, dan sejak saat itu pula peran pemerintah dalam ekonomi semakin dapat diterima, semakin menguat dan menenggelamkan paham liberalisme (Chaniago, 2010).

Keynes menawarkan dua cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengintervensi perekonomian untuk stabilisasi ekonomi. Pertama, pemerintah dapat melakukan **Kebijakan Fiskal**, yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penawaran dan pengeluaran pemerintah (Djohanputro, 2006). Kedua, pemerintah dapat melakukan **Kebijakan Moneter**, yaitu tindakan pemerintah dalam mencapai tujuan pengelolaan ekonomi makro (*output*, harga, dan pengangguran) dengan cara mempengaruhi situasi makro melalui pasar uang atau dengan kata lain melalui proses penciptaan uang atau jumlah uang beredar. Sasaran kebijakan moneter adalah meningkatnya GDP supaya mencapai tingkat potensialnya, terkendalinya laju inflasi dan rendahnya

pengangguran (Djohanputro, 2006). Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dapat memberikan sebuah dorongan pada perekonomian dalam suatu negara karena dengan dua hal tersebut masyarakat tidak akan menahan pengeluaran mereka dan melakukan *saving* selama masa krisis. Keynes menuliskan dalam bukunya:

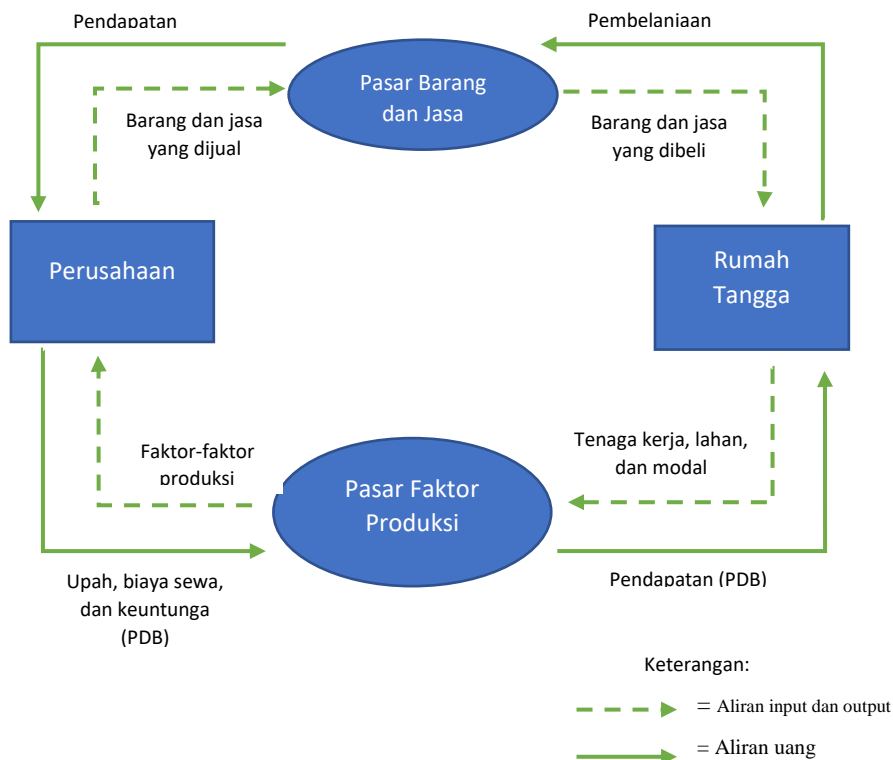
In so far as the inducement to the individual to save depends on the future return which he expects, it clearly depends not only on the rate of interest but on the fiscal policy of the government. Income taxes, especially when they discriminate against 'unearned' income, taxes on capital-profits, death-duties and the like are as relevant as the rate of interest; whilst the range of possible changes in fiscal policy may be greater, in expectation at least, than for the rate of interest itself. If fiscal policy is used as a deliberate instrument for the more equal distribution of incomes, its effect in increasing the propensity to consume is, of course, all the greater (Keynes, 1935).



Figur 1. 1 Aliran sirkular dengan peran pemerintah (Caporaso & Levine, 2013)

Figur 1.1 memberikan gambaran tentang aliran sirkular dengan intervensi pemerintah. Garis panah hijau merupakan aliran inklusif, ini artinya perekonomian secara murni berada pada aspek-aspek tersebut. Kemudian pada garis putus-putus berwarna kuning merupakan aliran yang bersifat terbuka, artinya aspek tersebut merupakan opsi lain yang menghasilkan pendapatan dan pengeluaran.

Pada alur tanpa intervensi pemerintah tidak akan ada aspek pajak dan pengeluaran pemerintah. Seperti pada figur 1.2 di bawah ini yang digambarkan dengan sangat sederhana tanpa aliran terbuka. Terdapat empat aspek utama yaitu rumah tangga, perusahaan, pasar barang dan jasa, serta pasar faktor produksi.



Figur 1. 2 Diagram arus lingkaran (Mankiw, Quah, & Wilson, 2010)

Jika pemikiran Keynes diterapkan pada figur 1.2 maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketika krisis terjadi, salah satu pihak dalam aliran tersebut akan mengurangi pengeluaran baik itu untuk tujuan menabung atau murni untuk menghemat karena perekonomian sedang tidak menguntungkan. Katakanlah rumah tangga yang mulai melakukan penghematan, maka pasar barang dan jasa akan terpengaruh. Permintaan berkurang dan kemudian perusahaan menjadi pihak selanjutnya yang juga terpengaruh. Alur ini akan terjadi secara berkelanjutan dan bisa menempatkan ekonomi pada posisi terburuk.

Oleh sebab itu peran pemerintah seperti pada figur 1.1 berperan sangat penting. Intervensi yang dilakukan pemerintah adalah untuk menciptakan sebuah *Agregat Demand (AD)*, yang menurut Keynes merupakan hal terpenting untuk menggerakkan ekonomi.

AD adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh masyarakat untuk membeli barang dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Nilai AD sama dengan nilai GDP. Terdapat dua cara untuk menghitung GDP, yaitu melalui pendekatan pendapatan dan melalui pendekatan pengeluaran. Pengeluaran dan Pendapatan akan selalu seimbang dalam sebuah masyarakat atau sebuah kelompok yang melakukan perekonomian. Sehingga menggunakan salah satu dari dua pendekatan tersebut akan memberikan hasil sama.

Dalam pendekatan pengeluaran terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan. Keempat hal itu adalah konsumsi (C), investasi (I), belanja

pemerintah (G), dan terakhir ekspor neto (NX). Intervensi pemerintah harus dimaksimalkan untuk mendorong 4 aspek tersebut.

Pada akhir tahun 2008, tepatnya pada bulan Desember, pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan fiskal berupa stimulus yaitu pemberian bantuan uang tunai pada setiap warga negara Australia. Kemudian disusul stimulus berikutnya yang dikenal dengan nama *The Nation-Building and Jobs Plan (NBJP)* yang disahkan pada Februari 2009 (Berrett, 2011).

Bank Sentral Australia juga memiliki beberapa opsi kebijakan yang diaplikasikan agar likuiditas tetap terjaga. *Lender of last resort (LOSR)* menjadi salah satu kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral pada saat lembaga keuangan di Australia saling menolak untuk memberikan pinjaman.

Kebijakan tersebut mempengaruhi 3 aspek yang telah disebutkan di atas yaitu konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Sedangkan komponen keempat (net ekspor) mendapat dorongan dari kerjasama antara Australia dan Cina yang semakin ditingkatkan pada saat krisis terjadi. Kedua negara berkomitmen untuk tetap melakukan konsolidasi ekonomi.

2. Konsep Kerjasama Bilateral

Negara dalam kapasitasnya sebagai aktor internasional, akan selalu berusaha memenuhi kepentingan nasional. Untuk mendapatkan hal tersebut, umumnya negara melakukan kerjasama. Baik itu dalam bidang ekonomi,

politik, maupun budaya. Setidaknya terdapat dua buah kerjasama yang dapat dilakukan oleh negara; multilateral dan bilateral.

Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Kerjasama ini sering terjadi di tingkat regional karena letak geografis yang berdekatan. Meski demikian, kerjasama multilateral tidak tertutup pada hal itu saja. Kerjasama multilateral juga bisa dilakukan oleh negara-negara yang letaknya berjauhan secara geografis. Misalkan sekelompok negara ingin melakukan kerjasama terkait suatu isu tertentu. Sehingga meskipun secara geografis letak negara-negara tersebut berjauhan, kerjasama multilateral masih tetap bisa dilakukan.

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Kerjasama bilateral memiliki sifat yang lebih fleksibel jika dibandingkan dengan kerjasama multilateral. Hal ini terjadi karena dalam kerjasama bilateral, perjanjian yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi kedua negara terkait. Jika kerjasama yang dilakukan dalam bidang ekonomi, yang menjadi pertimbangan adalah keuntungan yang akan didapat kedua negara. Sedangkan jika kerjasama yang dilakukan berada di ranah politik maupun budaya, maka nilai-nilai lain yang akan menjadi pertimbangan.

Australia, sebagai salah satu negara maju tak dapat lepas dari kerjasama antar negara. Partisipasi dilakukan dalam beberapa kerjasama baik yang bersifat multilateral maupun bilateral. Seperti misalnya ICAO (*International Civil Aviation Organization*) yang diikuti sejak tahun 1944 (Department of

Infrastructure and Regional Development, 2014). Sedangkan kerjasama bilateral juga dilakukan dengan beberapa negara seperti Indonesia, Inggris, dan China.

China memiliki peran penting bagi perekonomian Australia.

Kerjasama kedua negara telah dilakukan sejak lama. Mengutip Michael Priestley dalam tulisannya berjudul *Australia, China and the Global Financial Crisis*, mengatakan:

Australia and China are important investment partners and are engaged in significant joint ventures in the mining, resources and energy sectors (Priestley, 2010).

Pada 2005, *Australia-China free trade agreement* dilakukan. Hal-hal yang diatur di dalamnya menyesuaikan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan antara kedua negara tersebut. dengan adanya perjanjian tersebut, Australia mengakui bahwa China telah menjadi pasar ekonomi utama Australia (Priestley, 2010).

Pada saat GFC terjadi, kedua negara tersebut tetap berkomitmen untuk melakukan konsolidasi sehingga pergerakan ekonomi tetap terjadi. Hal ini terlihat dari melonjaknya nilai perdagangan kedua negara hingga 15.6% pada saat GFC terjadi. Padahal kerjasama Australia dengan negara lain mengalami penurunan di masa-masa tersebut.

C. Hipotesa

Dari kerangka pemikiran di atas, penulis dapat memulai penelitian dengan hipotesa sementara yaitu: Strategi Australia dalam menyelesaikan dampak krisis keuangan global adalah dengan (1) Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan bernama *Nation-Building and Jobs Plan* dan (2) Bank Sentral menjaga likuiditas keuangan negara, serta (3) pemerintah Australia mengadakan kerjasama luar negeri dengan Cina.

D. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberi gambaran dan kajian analitis terhadap Australia dalam menghadapi krisis keuangan global di tahun 2007-2008. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi kajian terkait krisis ekonomi global karena di dalam sistem ekonomi internasional saat ini, tidak menutup kemungkinan krisis akan terjadi lagi.

E. Jangkauan Penelitian

Penulis memberikan batasan waktu dalam penelitian ini yaitu dimulai pada tahun 2007 dimana krisis keuangan global menyebar ke seluruh dunia hingga awal tahun 2009 dimana ekonomi Australia yang sebelumnya turun akibat dampak krisis tersebut kembali mengalami peningkatan.

F. Metodologi Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan hasil studi pustaka dengan data-data sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, surat kabar, dan situs internet.

G. Sistematika Penulisan

BAB I menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang sejarah perekonomian Australia. Terdapat 3 sub bab di dalamnya yaitu Australia dalam perspektif sejarah, yang menjelaskan tentang keadaan historis Australia. Sub bab kedua berisi tentang reformasi ekonomi Australia yang terjadi selama tiga dekade. Sub bab terakhir terkait dampak yang diberikan oleh reformasi ekonomi di Australia. Dampak dari reformasi ekonomi tersebut juga menjadi bagian yang penulis jelaskan di bab 3, yaitu terkait krisis keuangan global, karena dampak reformasi tersebut memberikan keuntungan pada Australia di masa krisis.

BAB III menjelaskan mengenai krisis keuangan global. Apa faktor penyebabnya dan juga dampaknya terhadap negara-negara di dunia, termasuk Australia. Penulis menjelaskan lebih dalam bagaimana krisis keuangan global mempengaruhi perekonomian Australia dalam bab ini.

BAB IV memaparkan analisis terhadap Australia dalam menghadapi krisis keuangan global dengan menggunakan kerangka berfikir yang telah dijelaskan di atas. Penulis membagi bab ini ke dalam 4 sub bab. 2 sub bab pertama berupa analisis yang penulis dasarkan pada ekonomi Keynes, bahwa kebijakan finansial dan kebijakan moneter dapat memberi dorongan pada perekonomian yang melemah. Sub bab selanjutnya penulis menjelaskan bahwa kerjasama luar negeri yang dilakukan dengan China memberikan keuntungan bagi Australia di saat krisis. Pada sub bab terakhir penulis akan memaparkan data ekonomi Australia dari awal krisis keuangan global yang melumpuhkan perekonomian Australia hingga perubahan yang terjadi setelah pemerintah melakukan upaya penanganan terhadap krisis.

BAB V berisi kesimpulan terkait Australia dalam menyelesaikan dampak krisis keuangan global.